

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Minyak Bumi

1. Pengertian Minyak Bumi

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001.

Minyak mentah atau crude oil adalah cairan cokelat kehijauan sampai hitam yang terutama terdiri atas karbon dan hidrogen. Teori yang paling umum digunakan untuk menjelaskan asal-usul minyak bumi adalah "*organic soerce materials*". Teori ini menyatakan bahwa minyak bumi merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap selama ribuan sampai jutaan tahun. Akibat dari pengaruh tekanan, temperatur, kehadiran senyawa logam dan mineral serta letak geologis selama proses perubahan tersebut, maka minyak bumi akan mempunyai komposisi yang berbeda dari tempat yang berbeda.¹⁵

¹⁵ Dr. Widodo Ismanto dan Hadun Asmara, Industri MIGAS Prospek dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan, Penerbit IPB Press, Bogor:2017, hlm. 45.

Minyak bumi (*petroleum*) secara alami berbentuk cairan bisa-terbakar berwarna coklat hingga hitam. Minyak bumi secara prinsip ditemukan dalam cadangan minyak yang tersimpan di endapan batu dalam perut bumi. Meskipun bagaimana cara terbentuknya minyak bumi tidak diketahui secara pasti, namun umumnya disetujui bahwa minyak bumi berasal dari bintang laut dan serpihan tanaman yang mengalami tekanan temperatur tinggi. Diperkirakan juga bahwa perubahan ini mungkin dikatalisa oleh bahan dalam bebatuan. Apapun misalnya, semua minyak bumi terutama berisi campuran hidrokarbon yang bercampur dengan sejumlah bervariasi senyawa sulfur, nitrogen, dan oksigen.¹⁶

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Dimuat dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2001.

2. Manfaat Minyak Bumi

Minyak Bumi merupakan sumber daya alam penting dalam kehidupan yang memiliki banyak sekali manfaat. Adapun manfaat dari minyak bumi ialah;

a. Sebagai Bahan Bakar

Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses

¹⁶ Ibid.

penyulingan hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah.

b. Sumber Gas Cari

Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas. Gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi, selain dari manfaat gas alam. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan. Gas cair didapatkan dari sumber minyak bumi yang telah diolah dengan proses penyulingan dan pemurnian khusus.

c. Bahan Produksi Mobil

Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara dan menghasilkan produk utama dan sampingan. Sejumlah serat dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi dan dibuat menjadi lapisan blok badan mobil, beberapa komponen elektronik yang lebih ringan dan beberapa cairan untuk mobil seperti minyak rem, minyak pelumas dan bahan bakar mobil.

d. Pembangkit Listrik

Pengolahan atau pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Manfaat minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Uap panas akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit dan akan diterima oleh penggerak kumparan magnet untuk menghasilkan listrik.

3. Jenis Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak jenis bahan bakar minyak dibedakan menjadi 3. Jenis bahan bakar minyak ini dimuat dalam pasal 2 yaitu; a. Jenis BBM Tertentu; b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c. Jenis BBM Umum.¹⁷

Pasal 3 selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu;

- (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).
- (2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum untuk didistribusikan di wilayah penugasan.
- (3) Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten,

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2001 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak.

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

- (4) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.

B. Tinjauan Umum tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha.

Sebelum menyampaikan beberapa definisi tentang izin dari pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dalam arti sempit, Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah tindakan-tindakan yang oleh

pembuat Undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya¹⁸.

Pengertian izin menurut para ahli;

a. Bagir Manan;

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang.¹⁹ Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.²⁰

b. Prins;

Izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya tentu dilarang tapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut. Menurut sifatnya, tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alas-alas perlengkapan administrasi negara.²¹

c. Ateng Syarifuddin;

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 199.

¹⁹ Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Jakarta: Tidak Dipublikasikan, 1995, hlm. 8.

²⁰ Ridwan HR, 2014. Op. Cit, hlm. 198.

²¹ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta: 1994, hlm. 79.

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan. Hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin membutuhkan limitatif.²²

d. Lutfi Effendi;

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²³

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Izin adalah suatu perbuatan hukum bersegi satu dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan konsensi adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara memberi konsensi dengan yang diberi konsensi. Dalam hal konsensi biasanya diadakan suatu perjanjian, oleh karena itu mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal konsensi diadakan suatu perjanjian yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan-peraturan KUHPerdara mengenai hukum perjanjian.²⁴

²² Ateng Syarifuddin, "Perizinan untuk Kegiatan Tertentu", Majalah Hukum, Media Komunikasi FH Unpas, Edisi 23, Tahun 1997, hlm. 4.

²³ Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang:2004, hlm. 63.

²⁴ Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm 160.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa suatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan tertentu dapat ditaati.

2. Unsur Izin

Sebagaimana diketahui bahwa perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam perizinan tersebut harus termuatnya unsur-unsur yang antara lain, yaitu;²⁵

a) Instrumen yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en order*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.

²⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta:2011, hlm. 201.

Dalam melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algeemen strekking*), yang fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah.²⁶ Atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.²⁷ Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan. Atau “*beschikking welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*”²⁸ (ketetapan yang memperkenankan sesuatu sebelumnya tidak dibolehkan). dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.

b) Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan persatuan perundang-

²⁶ Sjachran Basah, “Perizinan di Indonesia” *Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan*, Fakultas Unair Surabaya, November 1992, hlm., 3.

²⁷ Ridwan HR, Op. Cit., hlm. 162.

²⁸ Ibid.

undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “*om positief recht ten kuunen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*”,²⁹ (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret). Pembuatan dan penertiban ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menertibkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dasar dari pemerintahan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *dikesionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintahan diberi

²⁹ Ibid.

kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
 - 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
 - 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan hak penerimaan maupun penolakan pemberian izin.
- c) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara tersebut (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang

didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.³⁰

Beragamnya organ yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang menimbulkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dalam menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Menurut Suhardjo, pada tingkat regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan menimbulkan gagasan mendorong untuk menyederhanakan peraturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyak mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.³¹ Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan biasanya dilakukan regulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu

³⁰ Sjachran Basah, 1996, "Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan", *Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan*, diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1992, Jakarta, hlm. 3.

³¹ Ridwan HR, Op. Cit., hlm 164.

terutama dibidang ekonomi, sehingga deregulasi itu ujungnya bermakna debirokratisasi.³²

Meskipun diregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan, namun harus dalam batas-batas tertentu. Artinya dalam deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan. Oleh karena itu, deregulasi dan debirokrasi harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Setidaknya deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut: *pertama*, jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu; *kedua*, deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial; *ketiga*, deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan; *keempat*, deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*elegemene beginselen van behoorlijk bestuur*)

d) Peristiwa konkret

Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan. Ketetapan yang digunakan oleh pemerintah

³² Bagir Manan, "Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah", Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran, Bandung:1996, No. 3 Vol 14, hlm., 33.

dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung yang kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Sekedar contoh, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan 9 jenis izin, Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan menerbitkan 5 jenis izin, Bagian Perekonomian menerbitkan 4 jenis izin, Bagian Kesejahteraan Rakyat menerbitkan 4 macam jenis izin dan sebagainya.³³

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Perosedur persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstruktif dan kondisional. Bersifat *konstruktif* oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) terpenuhi, artinya dalam hal perizinan ditentukan oleh suatu perbuatan konkret , dan

³³ Sjachran Basah, 1992, Op. Cit., hlm 166.

bilamana tidak terpenuhi akan dikenakan sanksi. Bersifat *kondisional*, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku disyaratkan itu terjadi.³⁴

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.³⁵

3. Fungsi dan Tujuan Izin

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret.³⁶ Sebagai suatu instrument, izin berlaku selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur terwujud. Ini berarti persyaratan – persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.³⁷ Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa

³⁴ Ridwan HR, Op. Cit., hlm., 166.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Sjachran Basah, Op. Cit., hlm 2.

berkenan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.³⁸

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:³⁹

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen – monumen);
- 4) Hendak membagi benda – benda yang sedikit (izin penghuni daerah padat penduduk);
- 5) Pengarahan, dengan menyeleksi orang – orang dan aktivitas – aktivitas (izin berdasarkan “*drank en herocawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat – syarat tertentu.

4. Sifat Perizinan

Berdasarkan uraian tentang izin diatas, yang pada dasarnya adalah sebagai keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau sustansinya mempunyai berbagai sifat, antara lain :

³⁸ Prajudi Atmosudirdjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 23 .

³⁹ Ridwan HR, 2002, *Op.Cit.* hlm. 167

1. Izin bersifat bebas adalah izin yang sebagai KTUN yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai KTUN yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin dapat ditarik kembali atau dicabu atau tidak. Hanya izin sebagai keputusan TUN yang bebas dapat ditarik kembali atau dicabu, karena ada syarat-syarat mengikat dimana izin tidak dapat ditarik atau dicabut. Sementara itu izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut.
3. Perizinan yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, misalnya SIM, SIUP, SITU dan lain sebagainya.
4. Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya Perizinan pendirian perusahaan. Perbedaan antara izin yang menguntungkan dan yang

bersifat memberatkan adalah dalam hal penarikan kembali ataupun pencabutan dan perubahannya. Izin yang menguntungkan yang berupa keputusan tidak begitu gampang ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Sedangkan penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya bersifat pendek, misalnya izin mendirikan bangunan yang hanya berlaku pada saat bangunan didirikan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dan izin yang berlangsung lama dalam hal penarikan kembali dan masa berlakunya izin.
7. Perizinan yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi.
8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU dan lain sebagainya. Perbedaan antara izin yang bersifat pribadi dan kebendaan adalah

penting karena hal itu menyangkut kemungkinan mengalihkannya kepada pihak lain, izin yang bersifat pribadi jelas tidak dapat dialihkan kepada lain misalnya SIM. Sedangkan yang dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya jika terjadi penjualan perusahaan maka izin HONYA dapat saja secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah.

C. Tinjauan Umum tentang Pom Mini dan Keamanan

1. Pengetahuan Umum tentang Pom Mini

Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) merupakan prasarana umum yang disediakan oleh distributor Bahan Bakar Minyak (BBM). SPBU disediakan guna mempermudah masyarakat luas untuk mengakses bahan bakar minyak. SPBU biasanya terletak di beberapa titik dalam satu daerah dengan jarak perunitnya yang sudah diatur agar tidak terlalu dekat satu sama lain, serta lahan pembangunan yang dijamin keamanannya.

Yang dapat dikategorikan sebagai pom mini adalah stand pengisian bahan bakar yang berada di sekitar pemukiman rumah warga dengan menggunakan pompa mesin digital seperti yang ada di SPBU dengan kapasitas penyimpanan 150 liter hingga 250 liter setiap mesinnya.

Pom Mini merupakan bentuk usaha dengan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan alat seperti yang mesin di SPBU. Usaha ini tengah menjamur di berbagai daerah bahkan kota

karena hanya diperlukan modal yang tidak banyak untuk membeli mesinnya. Penjual dapat menentukan sendiri takaran terhadap mesin pom mini tersebut. Namun dalam prakteknya ternyata pom mini ini belum memiliki izin resmi dari pemerintah, khususnya dari Pemerintah Daerah.

2. Dasar Hukum Izin Usaha Pom Mini

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5 angka 2 huruf d menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri dari kegiatan usaha hilir yaitu niaga.

Pasal 23 menjelaskan;

(1)“Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah.”

(2)“Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.”

Pasal 24 menjelaskan;

(1)“Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:

- a. Nama penyelenggara;
- b. Jenis usaha yang diberikan;
- c. Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- d. Syarat – syarat teknis.”

(2)“Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya digunakan sesuai dengan peruntukannya.”

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan tempat - tempat yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yaitu;

- a. “Tempat pemakanan, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- b. Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;
- c. Bangunan bersejarah dan simbol – simbol negara;
- d. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik berserta tanah perkarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.”

Pasal 53 huruf d menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00- (tiga puluh miliar rupiah).”

3. Pengetahuan Umum Tentang Keamanan

Keamanan merupakan suatu keadaan dimana tidak terjadi sesuatu yang membahayakan, baik berupa kecelakaan atau lainnya. Umumnya keamanan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu; 1) keamanan fisik; 2) keamanan informasi; 3) keamanan komputer; 4) keamanan finansial.

Keamanan dalam hal pekerjaan juga guna menunjang keselamatan kerja. Baik dalam segala tempat kerja, di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara. Keamanan dalam usaha juga ditujukan untuk pengusaha maupun karyawannya.

4. Dasar Hukum Keamanan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Berdasarkan sifatnya Bahan Bakar Minyak (BBM) mudah terbakar sehingga rawan dengan terjadinya kebakaran yang dapat megecam jiwa baik bagi pelaku usaha maupun konsumen tersebut, sehingga pemilik usaha mesti menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa :

- (1) “Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaannya;”
- (2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan :

a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang; atau

b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.”

(3) “Ketentuan mengenai tingkat potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

(4) “Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.”

Bekerja dalam lingkungan bahan bakar minyak sangatlah berbahaya bagi kesehatan karena harus menghirup uap bahan saat melayani konsumen, mencium aroma bahan bakar yang menyengat. Bahan bakar dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui berbagai macam rute paparan, yang paling sering terjadi ialah melalui hidung atau menghirupnya.

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Dalam Peraturan Pemerintah :⁴⁰

Pasal 1 menjelaskan;

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

1. “Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya;”

2. “Pengelolaan B3 adalah kegiatan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3;”

Pasal 13 menjelaskan ;

(1)“Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

(2)“Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang transportasi.

Pasal 14 menyebutkan “Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.”

Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Bahaya Dan Beracun yaitu pada Pasal 22 yang berisikan ;⁴¹

- (1) “Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.”
- (2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- (3) “Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3 wajib mengikutsertakan peranan tenaga kerjanya.”
- (4) “Peranan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang ketenaga kerjaan.”

Penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,

Pasal 24 menyebutkan “Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3.”

⁴¹ Ibid.

Pasal 25 menyebutkan “Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mengambil langkah-langkah:⁴²

- a. Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;
- b. Menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;
- c. Melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; dan
- d. Memberikan informasi, bantuan, melakukan evakuasi terhadap masyarakat disekitar lokasi kejadian.”

Pasal 26 menyebutkan “Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan dan keadaan darurat akibat B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.”

Pasal 27 menyebutkan “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, tidak menghilangkan kewajiban setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 untuk :

⁴² ibid.

- a. Mengganti kerugian akibat kecelakaan dan atau keadaan darurat; dan
atau
- b. Memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar;
yang diakibatkan oleh B3.”

Pelanggaran tertentu dalam pasal yang disebutkan diatas dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai yang diatur dalam pasal 38. Ringan juga beratnya sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

